

Pansus LKPj Lakukan Uji Petik di Bontang



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Senin,27/05/2024

BONTANG – Uji Petik Pansus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2023 di sejumlah pembangunan di Bontang belum lama ini mendapat banyak catatan.

Itu disampaikan Ketua Pansus LKPj Sapto Setyo Pramono, didampingi Wakil Ketua Pansus Baharuddin Demmu, dan sejumlah anggota Pansus, yakni Rusman Yaqub, Sutomo Jabir, M Udin, Ely Hartati, dan Qomariyah, setelah meninjau pembangunan jalan, jembatan, dan terminal.

“Pembangunannya itu semua dari APBD Kaltim 2023, baik belanja langsung maupun melalui bantuan keuangan Pemprov Kaltim. Semua yang bisa kami datangi, kami tinjau. Karena kami ingin memastikan, anggaran yang dikeluarkan sesuai fakta pembangunan di lapangan,” ujar Sapto, Senin (20/5).

Titik pertama yang ditinjau Pansus, yakni rekonstruksi Jalan Letjen Urip Sumoharjo, Kelurahan Bontang Lestari, dan rekonstruksi Jalan Soekarno-Hatta, Bontang. Dari data APBD 2023, rekonstruksi jalan tersebut dianggarkan sebesar Rp38,25 miliar. “Untuk Jalan Urip Sumoharjo anggarannya mencapai Rp30 miliar, dengan panjang jalan mencapai 6,4 kilometer. Sedangkan Jalan Soekarno-Hatta, anggarannya Rp8,25 miliar,” sebut dia.

Sapto menyampaikan, Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Soekarno-Hatta sudah berstatus sebagai jalan provinsi, harus ada serah terima aset disertai kondisi penanganan yang diperlukan. Termasuk kondisi jalan yang tampak retakan di badan jalan.

Dirinya meminta pihak pelaksana wajib melakukan pemeliharaan terhadap badan jalan yang mengalami keretakan. “Penyebab retak harus segera diatasi oleh pihak terkait dalam

hal ini UPTD PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), supaya kondisi badan jalan tidak semakin parah,” tegasnya.

Lokasi lainnya yang ditinjau Pansus yakni Pembangunan Jembatan Pontianak di Kelurahan Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Bontang. Pembangunan ini mendapat bantuan keuangan Prov. Kaltim sebesar Rp7,75 Miliar.

Titik lainnya yang dikunjungi Pansus yakni pembangunan yang masuk dalam penganggaran belanja langsung menggunakan APBD Kaltim 2023, yakni Pembangunan Terminal Tipe B Bontang dan Pembangunan Dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau Bontang.

Pengerjaan Pembangunan Terminal Tipe B Bontang, langsung diambil alih pihak Dinas Perhubungan Kaltim dengan pagu anggaran mencapai Rp16,12 miliar dan nilai kontrak Rp13,03 miliar.

Hal penting yang menjadi catatan Pansus ialah belum rampungnya pembangunan terminal secara menyeluruh. “Banyak catatan, seperti ada temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ditambah sudah lima kali addendum. Yang artinya, ada masalah dalam pembanguna gedung terminal ini,” ujar politikus Partai Golkar itu. **(adv/hms6/rom/k15)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Pansus LKPj Lakukan Uji Petik di Bontang, 27/05/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 154 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang di antaranya memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
2. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.